

SOSIOLOGI POLITIK

1. Pengantar

Dalam beberapa tahun terakhir perhatian yang semakin meningkat telah diberikan pada semakin pentingnya sosiologi politik. Sosiologi politik adalah sub-bidang yang muncul dan berkembang dalam sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Meskipun konturnya masih kurang tepat, semakin banyak sarjana yang menyadari pentingnya hal ini dalam studi politik. Keberadaan Komite Internasional Sosiologi Politik (1970) menunjukkan pentingnya tema baru tersebut. Terlepas dari kebingungan minat dan kegembiraan para ilmuwan sosial, lingkup cakupan sosiologi politik masih samar-samar didefinisikan, dan sub-temanya mengalir ke segala arah, memiliki bentuk yang bervariasi tanpa henti.

Sosiologi politik adalah campuran bahan dari disiplin ilmu politik dan sosiologi, karena ini merupakan perkawinan sosiologi dan ilmu politik, ulasan ilmiahnya sebagian besar terdiri dari bagian-bagian yang terputus-putus dan tidak terhubung. Mungkin sifat amorf dan variabel sosiologi politik dapat menjadi faktor yang sangat berharga bagi ilmuwan politik dan sosiolog untuk mengambil tantangan dan menemukan tren dan garis singgung yang terbentang dalam tekstur sosiologi politik.

Istilah 'sosiologi politik' bersifat seperti amuba dan cair, saling silang, karena tidak memiliki ketepatan. Sifatnya yang tidak konstan dapat disaksikan dari fakta bahwa sosiologi politik memiliki kekuasaan untuk mengubah dirinya menjadi berbagai bentuk yang tak ada habisnya dari benua ke benua. Di Prancis, istilah 'sosiologi politik dan ilmu politik' hampir identik dan mereka memperoleh legitimasi untuk menunjuk cabang sosiologi tertentu, salah satu ilmu sosial. Di negara-negara tertentu perbedaannya semata-mata bersifat administratif atau pedagogis.

Di A.S. di mana sosiologi dan ilmu politik adalah departemen terpisah, mereka berbicara tentang 'sosiologi politik' ketika seorang profesor dari departemen sosiologi berurusan dengan fenomena kekuasaan; dan 'sosiologi politik' ketika mata pelajaran yang sama diajarkan oleh seorang profesor dari departemen ilmu politik.

Di Eropa, istilah 'ilmu politik' (yang belum banyak digunakan) sering digunakan untuk menunjukkan bidang penelitian seorang sarjana yang pelatihannya didasarkan pada sejarah atau

hukum. Istilah 'sosiolog' lebih sering mengacu pada filsuf profesional atau lebih jarang, untuk orang yang terlatih dalam disiplin sosiologis murni.

Di beberapa negara Kontinental, istilah 'ilmu politik' mungkin mencerminkan kecenderungan tertentu untuk mengisolasi studi fenomena politik dengan membatasi kontakannya dengan cabang ilmu sosial lainnya. Istilah 'sosiologi politik', di sisi lain, dapat menunjukkan keinginan untuk mengembalikan fenomena politik ke tempatnya yang semestinya dalam spektrum fenomena sosial yang luas, untuk menghilangkan hambatan antar disiplin ilmu, dan untuk menekankan kesatuan esensial dari semua ilmu sosial. Dalam pengertian ini, istilah 'sosiologi politik' lebih disukai. Ini juga menunjukkan niat yang kuat untuk menggunakan metode penelitian empiris dan eksperimental daripada penalaran filosofis.

Latar belakang istilah 'sosiologi politik' ini mungkin dapat membantu dalam menemukan batas-batasnya yang asimetris. Untuk memahami dengan tepat makna, evolusi dan ruang lingkup sosiologi politik, penting untuk mengetahui perbedaan antara sosiologi dan ilmu politik; dan perbedaan serta hubungan antara sosiologi tentang politik dan sosiologi politik.

2. Sosiologi Politik (*Political Sociology*)

Sosiologi politik berkaitan dengan analisis sosiologis fenomena politik mulai dari negara dan masyarakat sipil hingga keluarga, menyelidiki topik-topik seperti kewarganegaraan, gerakan sosial, dan sumber kekuatan sosial.

Asal usul disiplin ini biasanya ditelusuri dari para pemikir seperti: Montesquieu, Smith dan Ferguson melalui para pendiri sosiologi, yaitu: Karl Marx, Emile Durkheim dan Max Weber, hingga ahli teori kontemporer, seperti: Anthony Giddens, Jurgen Habermas dan Michael Mann.

Sosiologi politik mencoba untuk:

- a. Mengkaji dan memilah penyebab ketegangan dalam masyarakat akibat aktivitas politik.
- b. Menunjukkan konsekuensi dan hasil dari aktivitas politik dan dampaknya terhadap rakyat biasa dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Melakukan penelitian terhadap masyarakat dengan penekanan utama pada aspek sosial dari semua perubahan, artinya bahwa kekuatan sosial yang beroperasi di balik fenomena politik lebih penting daripada fenomena politik itu sendiri.

3. Sosiologi tentang Politik (*Sociology of Politics*)

- a. Melakukan penilaian sosiologis terhadap politik dan menganggap fenomena politik sebagai variabel dependen dan fenomena sosial sebagai variabel independen atau penjelas.
- b. Sosiologi tentang politik adalah sub-aliran sosiologi.
- c. Menganggap manusia sebagai hewan sosial (*social animal*) yang juga bersifat politis.
- d. Memusatkan perhatian pada studi hubungan sosial dan dalam pelaksanaannya memperhitungkan hubungan manusia secara politis.

Sosiologi tentang politik jelas merupakan sub-bidang sosiologi. Sosiologi tentang politik adalah penilaian sosiologis tentang politik. Sosiologi tentang politik memperlakukan fenomena politik sebagai variabel dependen dan menerima fenomena sosial yang mendasarinya sebagai variabel penjelas (*explanatory variable*). Sedangkan sosiologi politik adalah suatu upaya untuk memahami fenomena politik dengan selalu mengaitkannya dengan determinan sosial. Sosiologi politik adalah pemeriksaan tentang hubungan antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara perilaku sosial dan perilaku politik. Dengan demikian, sosiologi politik lahir ketika pendekatan sosiologis dan pendekatan politik logis digabungkan pada titik temu mereka. Jika sosiologi tentang politik berkaitan dengan alasan-alasan non-politik mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan dalam kehidupan politik, sosiologi politik mencakup alasan-alasan politik mengapa orang bertindak seperti itu. Oleh karena itu, sosiologi politik adalah terobosan lintas disiplin yang mencari model yang diperbesar yang memperkenalkan kembali variable-variabel seperti yang 'diberikan' dari setiap sumber komponen.

1. Sosiologi Politik versus Sosiologi tentang Politik

- a. Tidak diragukan lagi sosiologi politik menggabungkan dirinya dengan banyak sosiologi tentang politik, namun keduanya tidak identik atau sinonim.
- b. Sosiologi politik memang merupakan sub-aliran ilmu politik dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara ilmu politik dan sosiologi.
- c. Sosiologi politik ini adalah sesuatu yang lebih dari sekedar sosiologi tentang politik.
- d. Sosiologi politik meyakini pada hubungan dialektis antara sosiologi dan ilmu politik.

- e. Sosiologi politik ini memberi penekanan yang sama pada variabel sosial dan politik.
- f. Sosiologi politik tidak hanya menjelaskan kerja politik dalam kaitannya dengan masyarakat tetapi juga mengkaji respon terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh negara dan pemerintahannya serta lingkungan sosial ekonomi politik.
- g. Menurut Giovanni Sartori:
 - 1) Sosiologi tentang politik berkaitan dengan konsumen dan bukan produsen.
Sifat sosiologi tentang politik seperti sistem ekonomi yang memiliki pembeli tanpa produsen dan penjual.
 - 2) Sebaliknya, sosiologi politik memperhitungkan pembeli dan penjual, konsumen dan produsen. Sosiologi politik mempelajari politik dalam kaitannya dengan masyarakat seperti antar-hubungan dan interaksi antara negara, pemerintah dan masyarakat. Sosiologi politik merupakan hibrida interdisipliner yang melibatkan perpaduan antara politik dan sosiologi.

2. Definisi Sosiologi Politik

- a. Smelser N. J.:
"Sosiologi politik adalah studi tentang hubungan antara masyarakat dan pemerintahan, antara struktur sosial dan institusi politik".
- b. American Sociological Assosiation:
Studi sosiologi politik meliputi "sosiologi memahami fenomena politik."
- c. A.K. Mukhopadhyaya:
Sosiologi politik adalah anak dari hasil perkawinan antara sosiologi dan ilmu politik dan seperti dalam masalah manusia, tidak bisa semata-mata ditandai dengan kualitas orang tua nya sendiri".
- d. Robert. E. dan John. A. Hughes:
"Sosiologi politik adalah studi tentang perilaku politik dalam kerangka perspektif sosiologis".
- e. Michal Rush dan Philip Althoff:
"Sosiologi politik adalah interaksi dan hubungan antara masyarakat dan negara, antara struktur sosial dan struktur politik dan antara perilaku sosial dan perilaku politik".

3. Ruang lingkup Sosiologi Politik

- a. Sosiologi politik mempelajari politik di empat tingkat.
 - 1) Konflik politik dan perjuangan antar bangsa yaitu sosiologi hubungan internasional.
 - 2) Sifat dan peran negara dalam berbagai masyarakat.
 - 3) Sifat dan organisasi gerakan dan partai politik.
 - 4) Partisipasi individu dalam politik.
- b. Bidang studi utama dalam sosiologi politik dapat diidentifikasi:
 - 1) Sifat dan fungsi umum negara dan sistem politiknya.
 - 2) Sifat partai politik, kelompok penekan dan semua organisasi dan gerakan politik lainnya.
 - 3) Pola partisipasi politik dan perilaku politik, termasuk partisipasi masyarakat, misalnya, penelitian empiris tentang partisipasi rakyat dalam politik dan perilaku pemungutan suara.
 - 4) Kekuasaan dan dominasi di masyarakat.
 - 5) Elit politik dan massa dan sejauhmana masyarakat modern dapat dikatakan didominasi oleh kelas penguasa.
 - 6) Hubungan antar bangsa.
- c. Sosiologi politik berkaitan dengan hubungan antara negara dan masyarakat
 - 1) Bagaimana keadaan negara modern.
 - 2) Bagaimana hal itu dipandang sah.
 - 3) Bagaimana pemecahan berdasarkan kelas, ras, dan gender mempengaruhi representasi Demokratis.
 - 4) Bagaimana demokrasi liberal menyusun kebijakan negara kesejahteraan.
 - 5) Bagaimana negara menciptakan dan mengelola pasar.
 - 6) Bagaimana gerakan sosial berusaha untuk menghasilkan perubahan politik dengan mengajukan klaim kepada aktor negara.

4. Fokus perhatian sosiologi politik menurut Rafael Raga Maran (2001: 1)

Melihat dan memahami pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan politik atau pemerintah.

- a. Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara (sama halnya dengan pandangan Kate Nash).

- b. Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-kondisi sosial yang mempengaruhi pembuatan program-program publik yang ditetapkan pemerintah, misalnya:
- 1) Pengaruh kelompok-kelompok sosial tertentu terhadap penetapan kebijakan-kebijakan publik oleh pemerintah.
 - 2) Mengkaji bagaimana pengaruh masyarakat terhadap norma-norma rejim, yaitu mengkaji kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya suatu demokrasi politik yang stabil, atau persyaratan-persyaratan sosial apa yang harus dipenuhi agar terwujud suatu tatanan politik atau kekuasaan yang demokratis.